EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG KABU KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

LIANA WULANDARI
1705905010089

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 18 Maret 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : LIANA WULANDARI

NIM : 1705905010089

Dengan Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG KABU KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Said Achmad Kabiru Rafiie, M. BA
NIP. 198602072019031007

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, S.H., M.H
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP.199005122019032026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 18 Maret 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : LIANA WULANDARI

NIM : 1705905010089

Dengan Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG KABU KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 18 Maret 2022

No	Menyetujui Komisi ujian	Tanda tangan
1 Ketua	: Said Achmad Kabiru Rafiie, M. BA	(.....)
2 Anggota	: Nodi Marefanda, M.A.P	(.....)
3 Anggota	: Sri Wahyu Handayani,S.Ap.,MA	(.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safrida,S.Sos.,M.AP
NIP.199005122019032026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: LIANA WULANDARI
Nim	: 1705905010089
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlurunya.

Meulaboh, 17 Juni 2022

Liana Wulandari
1805904030004

PERSEMBAHAN

Bissmillaahirrahmaanirraahiim...

Jangan lah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.s Ali Imran:139).

Pada dasarnya Takdir Allah selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya.
(Umar Bin Khattab)

Alhamdulillah.....
Hari ini telah engkau penuhi harapanku
Harapan untuk membahagiakan orang-orang tercinta
Walau hari depan masih dalam sebuah tanda Tanya.....

Kupersembahkan.....
Sebuah karyaku untuh Ayahanda tercinta (Alm. Mustafa), Ibundaku tercinta (Nurijah) dan kakak, abang dan adikku tersayang, (Nurdiana, Muhammad Adhari dan Najwatul Putri) Yang tiada henti memberiku kasih sayang, semangat, do'a, dorongan, nasehat, serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku....
Ayah....
Terimakasih atas semua yang telah kau beri, setiap apa yang engkau kerjakan semata-mata hanyalah untuk anak-anakmu, alhamdulillah hari ini adek sudah menyelesaikan harapan ayah, walaupun engkau telah tiada namun ayah bisa melihat semua ini. Hanya do'a yang selalu kupanjatkan untuk engkau ayah. Terimakasih ayah atas kasih sayang, ketulusan, motivasi dan pengalaman hidup sehingga adek tidak putus asa dan dapat mengejar cita-cita adek
Ibu...
Terimakasih atas semua kasih sayangmu, dan pengorbananmu yang tidak dapat kami balas dari mengandung Sembilan bulan hingga aku dewasa kini. Di waktu kecil engkau menjaga kami hingga sekarang masih sama, kasih sayangmu tak pernah pudar dan berubah walau sudah terbagi namun masih sama. Doamu ibu sangat mujarab bagiku, sungguh ibu apa yang kau kerjakan tak dapat terbalaskan. Terima ksih ibu atas jasa-jasamu dari kecil sampai besar
Kini menjadi sarjana engkau selalu ada dan selalu memberi semangat untuku.
Kakak dan abangku....
Terima kasih juga adek ucapkan kepada kalian atas canda tawa selama ini. Walau kita jauh namun ketahuilah adek sayang sama kalian dan adek harap kalian semua selalu sehat, umur panjang dan dilimpahkan selalu kebahagiaan hingga dan untuk adik jadilah anak yang membanggakan dan jadilah anak yang berbakti pada ayah dan ibu.
Dosen ku
Terimaksih kepada bapak bapak Said Achmad Kabiru Rafiie, M. BA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan pengarahan, serta denga tulus dan iklas menberikan saran dan masukan untuk saya dalam pembuatan karya skripsi ini. Terimakasih juga kepada dosen penguji I bapak Nodi Marefanda, M.A.P dan dosen penguji II ibu Sri Wahyu Handayani, MA yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi yang berharga di dunia dan akhirat nanti.....
Terimakasih buat teman-teman angkatan 2017 FISIP khusunya Fakultas Ilmu Administrasi Negara terimakasih atas support dukungannya, bagi teman-teman yang belum selesai dan yang lagi berusaha semangat ya kawan. Dan terimakasih jugak yang spesialnya untuk sahabat ku tercinta khususnya Mila Imelia SAN, Novita Dewi SAN, Desi Fatria Munawarah SAN, Fitria Munawarah SAN, Rika Nurzila SE, Rahmi Fatma SE, Rina Zulinda SE, serta teman-teman lainnya yang tak mungkin disebut satu persatu. Terima Kasih atas segala yang telah kita lewati bersama dan terkadang mungkin aku terlalu mengesalkan sering buat kalian marah namun persahabatan kita takkan tergoyahkan, dan saya sangat bersyukur Allah telah memberikan sahabat-sahabat yang bersedia meluruskan kesalahan saya jika ternyata saya melakukanya dan semoga Allah juga semakin mempererat silahturahmi kita.
Amin.....

ABSTRACT

Village fund is the funds which allocated by the central government for villages/Gampongs that aim to improve the village's economy. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of Gampong fund management on the development of Gampong Kabu, Tripa Makmur District, Nagan Raya Regency. This research was conducted by qualitative descriptive analysis. The results of interviews and observations discovered that village funds distributed by the central government through the Gampong Community Empowerment Service of Nagan Raya Regency for Gampong Kabu in 2019 amounted to Rp. 1,218. 000 000, - of the funds allocated for the development of the village of Rp. 519.159.200,- . Construction was carried out on hoarding activities such as improving roads, football field stadium, construction of mosques and construction of box calver. From the research results, it is known that the effectiveness of village fund management for development in Gampong Kabu has been effective because it is in accordance with the applicable regulations, namely in accordance with Law no. 6 of 2014 concerning Villages, article 81. The development of Gampong Kabu is carried out in accordance with the results of the deliberation in the Gampong Musrembang and implementation is carried out by utilizing local resources. Fund reporting is carried out in a transparent and accountable manner to community members through banners and flyers at the village's office. The problem in managing village funds is that existing development projects have not provided benefits for the development of reading activities such as reading library in Gampong.

Keywords: Effectiveness, Village Fund, Development

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang di alokasikan pemerintah pusat untuk Desa/Gampong yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Gampong. Tujuan penelitian ini untuk mengan alisis efektifitas pengelolaan dana Gampong terhadap pembangunan Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif analisis. Hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Nagan Raya untuk Gampong Kabu pada tahun 2019 sebesar Rp.1.218. 000.000,- dari dana tersebut yang di alokasikan untuk pembangunan Gampong sebesar Rp. 519.159.200,- . Pembanguan dilakukan pada kegiatan serak sertu jalan, tribun lapangan bola kaki, pembangunan masjid dan pembangunan *box calver*. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa efektifitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Gampong Kabu sudah efektif karena sudah sesuai dengan atauran yang berlaku yaitu sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 81. Pembangunan Gampong Kabu dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah dalam musrembang Gampong dan pelaksanaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pelaporan dana dilakukan secara trasparan dan akuntabel kepada anggota masyarakat melalui spanduk dan *flyer* di kantor desa. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa yaitu proyek pembangunan yang ada belum memberikan manfaat bagi pengembangan minat baca seperti taman baca di Gampong.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga Proposal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Proposal skripsi yang berjudul **"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya"** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesepakatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin meyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada :

1) Kedua orang yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Mustafa (Alm) serta Ibunda tercinta Nurijah yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.
2) Bapak Said Achmad Kabiru Rafiie, M.BA Selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia

3) meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini
4) Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
5) Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si dan Ibu Safrida, M. AP selaku ketua dan sekretaris program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6) Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2017.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudah proposal skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Meulaboh, 18 Maret 2022
Penulis

Liana Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRACT ..... ***vi***
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 6
1.5. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1. Efektivitas 9
2.1.1. Pengertian Efektivitas 9
2.1.2. Ukuran Efektivitas 10
2.2. Pengelolaan 11
2.3. Dana Desa 12
2.3.1 Tujuan Dana Desa 14
2.4. Pembangunan 19
2.4.1 Teori-Teori Pembangunan 20
2.4.2 Indikator Pembangunan 21
2.5. Gampong 23
2.6. Penelitian Terdahulu 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **27**
3.1. Metode Penelitian 27
3.2. Sumber Data 27
3.3. Teknik Pengumpulan Data 28
3.4. Teknik Penentuan Informan 30
3.5. Instrumen Penelitian 31
3.6. Teknik Analisis Data 31
3.7. Uji Kredibilitas Data 32
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 34

BAB IV HASIL PENELITIAN **36**

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 36
4.1.1 Potensi Ekonomi Gampong Kabu 37
4.1.2 Fasilitas Bangunan yang ada di Gampong Kabu 38
4.1.3 Visi Misi Gampong Kabu 38
4.1.4 Program Kerja Gampong Kabu 40
4.2 Karakteristik Informan 42
4.3 Hasil Wawancara 42
4.3.1 Hasil Wawancara dengan Aparat Gampong Kabu 42
4.3.2 Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Kabu 47

BAB V PEMBAHASAN 53
5.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Kabu 53
5.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Gampong Kabu 55
5.2.1 Perencanaan 56
5.2.2 Penganggaran 57
5.2.3 Pelaksanaan 57
5.2.4 Penata Usahaan 57
5.2.5 Pelaporan 58
5.2.6 Pertanggung Jawaban 58
5.3 Peraturan-peraturan Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Dana Desa 59

BAB VI PENUTUP 61
6.1 Kesimpulan 61
6.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peraturan Pengelolaan Dana Desa 12
Tabel 3.1 Tabel Informan 30
Tabel 3.2 Rancangan Jadwal Penelitian 34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Kabu 36
Tabel 4.2 Bangunan Fisik di Gampong Kabu 38
Tabel 4.3 Karakteristik Informan 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 15
Gambar 2.2 Alur Penerimaan Dana Desa 18
Gambar 4.1 Gambar Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Gampong Kabu 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran untuk pengelolan dana yang dimulai dari pusat, daerah dan desa. Pembangunan sebuah negara dimulai dari desa. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang terkecil dalam melayani masyarakat secara langsung. Kemajuan pembangunan suatu negara dimulai dengan kemajuan pembangunan di desa. Bahwasanya Pemerintah telah mengatur dan menetapkan anggaran dana desa untuk persatuan dan kemajuan suatu gampong untuk meningkatkan pembangunan.

Di Indonesia, dana desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana Desa yang diatur dengan proses penyusunan anggaran dalam melaksankan suatu usaha dengan laporan dan bertanggung jawab, anggaran dana desa berasal dari pusat, di turunkan ke kabupaten yang kemudian baru diterima oleh desa yang jumlahnya kurang lebih lebih 10 % (sepuluh persen), Boedijono, dkk. 2019).

Berdasarkan peraturan dari kementrian Keuangan Republik Indonesia, jumlah dana desa Tahun 2018 dalam pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan anggaran desa yang diatur dalam peraturan keuangan desa. Yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung pembangunan agar lebih efektif dan efesien.

Pengelolaan anggaran desa diatur dalam perhitungan anggaran desa untuk setiap desa yang diatur dalam mengelola keuangan. Pada tahun 2018, peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tata cara anggaran desa setiap daerah Kabupaten/Kota dialokasikan dengan adil untuk melihat jumlah anggaran untuk semua desa, kemudian anggaran desa diatur dalam hitungan yang diketahui jumlah anggaran alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dalam mengelola jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang paling tinggi jumlah penduduk yang paling miskin.

Jumlah desa di Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan peraturan kementerian dalam Negeri No.137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat 74.957 desa, 8.490 Kelurahan, 7.094 Kecamatan, 98 Kota, dan 416 Kabupaten.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus karena terdapat keistimewaan di daerah tersebut. Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh merupakan semangat baru dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh disebut sebagai Nanggro Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yaitu disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian, kemanfaatan, dan

keadilan. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2020 jumlah penduduk Aceh mencapai 5,3 juta jiwa.

Kabupaten Nagan Raya adalah kabupaten di provinsi Aceh, ibu kotanya Suka Makmue, kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Aceh Barat. Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 Kecamatan dan 222 gampong yang memiliki jumlah penduduk 167.672 jiwa. Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah dana desa bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 sebesar Rp 211.580.978.500, masing-masing Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN Rp 158.922.821.000, dan Alokasi Dana Gampong (ADG) dari APBK Rp 52.658.157.500, yang dibagi untuk 222 Gampong 10 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.

Gampong Kabu merupakan suatu Gampong yang berada di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki Jumlah penduduk sebanyak 1.152 jiwa, yang menjadi objek kajian tentang pengelolaan dana Desa dalam penelitian ini, berkaitan dengan alokasi dana desa. Adapun sumber anggaran yang diterima oleh Gampong Kabu yaitu berasal Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADG).

Dana desa adalah anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana

Gampong adalah alokasi anggaran yang di ambil dari bagi hasil dan dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Besaran anggaran yang diterima oleh Gampong Kabu pada tahun 2019 sebanyak Rp. 1.218.000.000 (DD), dari anggaran dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 519.159.200. dengan jumlah anggaran dana yang dikeluarkan dalam bidang pembangunan dalam satu tahun anggaran pembangunan yang telah dilaksanakan di tahu 2019 yaitu: pembangunan serak sertu jalan, pembangunan tribun lapangan bola kaki, pembangunan mesjid, pembangunan box calver 2 unit. (Sumber: Bendahara Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya).

Dalam penelitian Purnamasari (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perancangan anggaran desa telah menetapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas untuk dibuktikan dalam musrembang desa hasil dari musyawarah dilampirkan dilaporan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan di Desa Pakuniran masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabiltas, dibuktikan dengan semua kegiatan dicantumkan di laporan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ditemukan bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2014 efektivitas pelaksanaan ADD pada tingkat efektivitas karena setiap tahunnya pada angka

90%-100%, hambatan yang dialami adalah berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang ADD, terjadinya kesalahpahaman antar unit kerja, pencairan ADD yang tidak tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu;

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh aparatur Gampong Kabu?
3. Apa saja peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana Desa di Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Desa yang telah dilakukan oleh aparatur Gampong.
3. Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian telah penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah sosial dan administrasi yang sewaktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan tambahan informasi yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Dengan kata lain dapat membantuk pihak-pihak Desa dengan tujuan lebih meningkatkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan

evaluasi, khusus bagi aparatur Desa Gampong Kabu juga bisa menambah pengetahuan, dan pengalaman yang nyata dalam mendapatkan ilmu yang telah diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberi gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **:** Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **:** Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang diperoleh dari pustaka-pustaka, jurnal dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

BAB III **:** Metodelogi penelitian

Bab ini memuat tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisa data.

BAB IV **:** Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi seperti jawaban dari informan dan tertulis.

BAB V : Pembahasan

Selain itu bab ini juga berisi tentang pembahasan dan uraian data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut James L. Gibson (dalam Pasolog 2017:4), bahwasanya efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan dari suatu hasil uapaya bersama. Dengan suatu target untuk mencapai sasaran. Tjokroamidjojo (dalam Pasolog 2017:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah melaksanakan suatu administrasi yang mencapai hasil seperti yang ditargetkan, untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi hasil.

Sedangkan menurut Keban dalam (Pasolog 2017:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pengorganisasian yang efektif mempunyai suatu nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk mencapai visi yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tujuan untuk mencapai hasil bersama yang telah direncanakan. Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintahan Desa dalam mengelola anggaran dana desa (ADD) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pencapaian yang telah ditetapkan bersama, bagaimana yang telah disepakati dengan masyarakat sekitar.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Siagian (1978) efektivitas dilihat dari suatu pencapaian untuk membandingkan rencana yang ditemukan atau dalam suatu pencapaian. Bahwasanya sasaran yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan yang efektif dari tingkat efektivitas, untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dapt dilihat dari:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

   Hai ini dapat menyebabkan karyawan dalam melakukan tugas nya dapat mencapai target sesuai dengan sasaran tujuan dalam organisasi yang dicapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

   Dapat dikatakan suatu perencanaan untuk melaksanakan suatu pencapaian dalam melakukan pelaksanaan pengorganisasian.

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

   Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Perencanaan yang matang

Yaitu keputusan yang telah dilaksanakan dalam organisasi dimasa yang akan datang.

5. Penyusunan program yang tepat

   Perencanaan yang logis yang dapat dijadikan untuk melaksanakan sasaran yang tepat jika tidak pelaksanaan kurang memiliki contoh.

6. Terjadinya sarana dan prasarana kerja

   Salah satu indikator organisasi adalah kemampuan bekerja yang mencapai hasil dengan optimal. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

   Dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan dalam suatu tujuan dan sasaran, karena pelaksanaan organisasi semakin dekat dengan tujuannya.

2.2 Pengelolaan

Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) yaitu pengelolaan suatu penggerakan yang mengatur tentang pengarahan dalam usaha untuk memamfaatkan dan mencapai suatu hasil yang telah tetapkan yang merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan, bahwa “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah mengatur, mengurus, atau cara melakukan kegiatan tertentu yang dapat menggerakkan tenaga orang lain denga merumuskan kebijaksanaan tujuan organisasi yang memberikan pengawasan dan pengarahan pada tujuan yang hendak dicapai.

2.3 Dana Desa

Table 2.1

Peraturan Pengelolaan Dana Desa

No	Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tentang desa menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2	Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana tahun 2020.
3	Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Peraturan mentri

	dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, didalamnya membahas tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APB desa, belanja desa, pendapatan desa dan pembiayaan desa.
5	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019, bahwa berdasarkan pasal 8 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang anggaran 2019, perlu ditetapkan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 diatur dengan peraturan Gubernur Aceh.
6	Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolalaan keuangan gampong tahun 2020.
7.	Peraturan Kepala desa Kabu Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Kabu tahun anggaran 2020, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran 2020, maka perlu menyusun peraturan Keuchik gampong tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Dana desa merupakan suatu anggaran desa yang bersumber dari pendapatan belanja negara yang terintergrasi untuk memdapatkan pendapatan

anggaran yang disusun dengan dilaksanakannya musyawarah perencanaan untuk pembangunan desa dengan masyarakat biasa.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.1. Tujuan Dana Desa

Landasan Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Tujuan Dana Desa yaitu;

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa masih kurang membuka ruang dengan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan desa

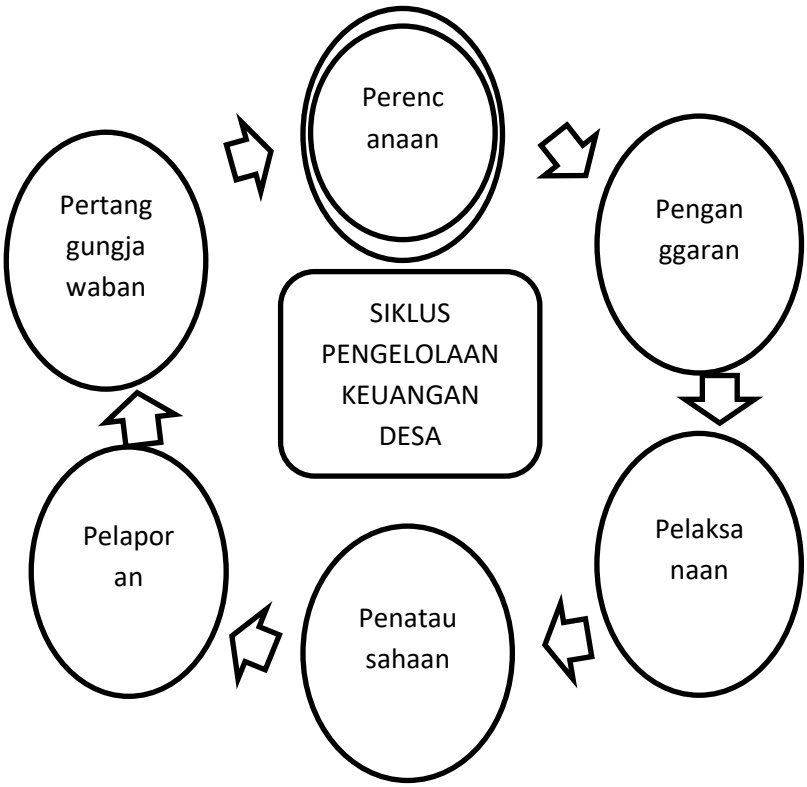

Sumber: Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Penganggaran

Setelah RKP desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggarang biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas, pembantu kegiatan dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

4. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, prinsip, standar, serta produsen tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera

diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegatan penatausahaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum masyarakat desa.

Gambar 2.2

Alur Penerima Dana Desa

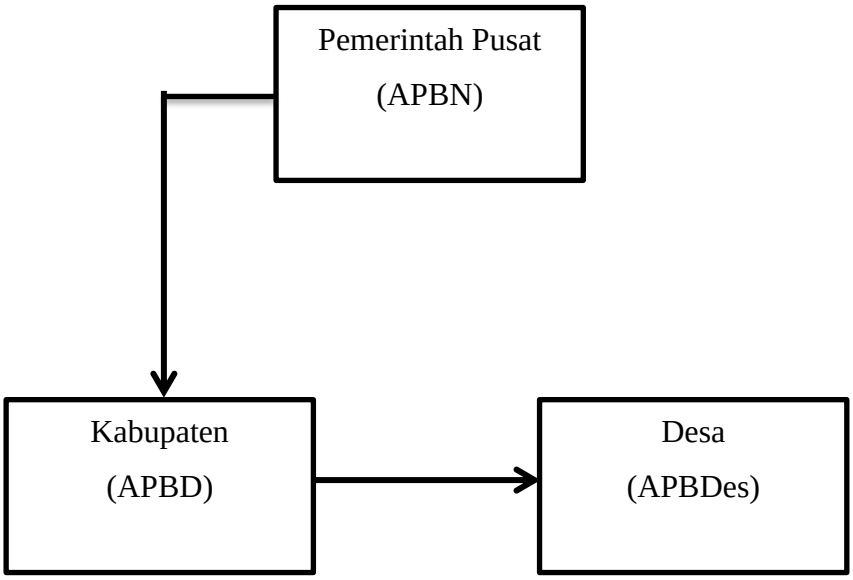

Sumber: wawancara dengan bendahara Gampong Kabu, 2020

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten (APBD), dan selanjutnya dilakukan verifikasi setelah itu diajukan pencairan baru masuk kedalam rekening desa (APBDesa). Ada 3 tahap penyaluran dana desa yaitu sebagai berikut:

- Tahap I sebesar 40% dari pagu dana desa paling cepat Maret dan paling lambat April
- Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat Juli dan paling lambat Agustus
- Tahap III sebesar 20% dari pagu dana desa, paling cepat November dan paling lambat Desember.

2.4. Pembangunan.

Menurut Siagan (2008) pembangunan merupakan salah satu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisi misalnya berupa infrastruktur, pembangunan, fasilitas umum (Kuncoro, 2010:20). Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001:47) "pembangunan adalah sebagai perubahan sosial yang berasal dari keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicadangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2001:54)". "Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan contoh dari pembangunan fisik adalah":

1. Prasarana pembangunan yaitu: jalan, jembatan, dll
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, dan masjid.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwudujud namun dapat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang kaamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, pembuatan surat kelahiran, pembuatan surat keterangan berdomisili.

2.4.1 Teori-Teori Pembangunan

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis paradigma, yaitu Moderenisasi dan Ketergantungan (Lewwellen 1995; Larrain 1994; Kiely 1995 Dalam Tikson , 2005). Paradigma Moderenisasi disebut dengan teori-teori makro tentang perubahan ekonomi dan perubahan sosial dan mikro adalah nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Sedangkan paradigma ketergantungan yaitu mencakup teori-teori keterbelakangan (*Underdevelopment*), ketergantungan (*Dependent Development*), dan system dunia (World) SystemTheory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Menurut Siagan (1994 dalam Digdowiseiso) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerimtah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building).*

Sedangkan Kartasasmita (1994 dalam Digdowiseiso) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

2.4.2 Indikator Pembangunan

"Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah diperlukan indikator-indikator untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakata. Indikator tersebut menurut Lincolin Arsyad (2010:30), yaitu":

1. Pendapatan per kapita

   Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per capital juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per capital juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa kemasa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara-negara lain.

   Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda, meskipun tingkat pendapatan per kapita relatif sama:

1) Pola pengeluaran masyarakat. Perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per capital yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama.
2) Perbedaan iklim. Adanya perbedaan iklim juga memungkinkan timbulnya perbedaan pola pengeluaran masyarakat di negara-negara maju. Seperti kita ketahui, sebagai besar negara maju beriklim dingin dan sebagian beriklim tropis.
3) Struktur produksi nasional. Adanya perbedaan yang mencolok pada komposisi sectoral juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukan modal (capital formation) lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per capital yang relatif sama.

2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih

Sebuah pendekatan baru tentang indikator pembangunan, mencoba menyempurnakan metode perhitungan GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator pembangunan ekonomi yang lebih baik yaitu dengan mengenalkan konsep New Economic Welfare (NEW). Penyempurnaan metode perhitungan GNP dilakukan dengan du acara yaitu melakukan koreksi positif dan koreksi negatif.

2.5 Gampong

Dalam pasal 2 dan 3 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'ah Islam.

Pasal 1 Angka 20 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Gampon*g* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Djuned (2008, h : 11) mengemukakan bahwa: *"gampong* dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum *Gampong* merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial. Sufi (2002, h:33-39) berpendapat bahwa :

"*Gampong* terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah *gampong* terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan *gampong* disebut *keuchik*, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan *teungku meunasah*. *Gampong* merupakan pemerintahan bawahan dari mukim".

Menurut Ismail, (Dalam Jakfar 2012, h:) mengatakan bahwa “Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu *gampong* juga memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas teritorial. *Gampong* berwenang penuh untuk mengebangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat dan sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gampong adalah pembagian wilayah di tingkat kelurahan atau desa yang memiliki kesatuan masyarakat hukum, adat dan batas wilayah dan yang berada dibawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik yang mempunyai aturan dan ketentuan yang berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Fitri (2019) yang meneliti tentang “Efektivitas pengelolaan anggaran alokasi dana desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari empat (4) tahap, yaitu penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Persamaan dan perbedaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya Fitri yaitu:

a. Persamaan penulis dan peneliti terdahulu sama sama ingin meneliti tentang efektivitas pengeloaan dana desa , dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
b. Sedangkan perbedaan penulis dengan peneliti yaitu peneliti lebih berfokus kepada pembangunan daerah dan otonomi daerah, sedangkan penulis lebih berfokus kepada pembangunan gampong,

Penelitian Novita (2016) yang meneliti tentang "Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisien dan efektivitas serta efek penganda pengolahan dana desa Kecamatan Leuwiliang Bogor, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kombinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi desa-desa di Kecamatan Leuwiliang sebesar 81%, yang memenuhi kriteria cukup efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas desa-desa di Kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk dalam kategori efektif. Persamaan dan perbedaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya Novita yaitu:

a. Persamaan penulis dan peneliti terdahulu sama sama ingin meneliti tentang efektivitas pengeloaan anggaran dana desa , dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
b. Sedangkan perbedaan penulis dengan peneliti Novita yaitu peneliti Novita lebih berfokus kepada analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa, sedangkan penulis lebih berfokus kepada efektivitas

pengelolaan dana desa, dan perbedaan lainnya adalah tempat penelitiannya.

Penelitian Kinaro (2019) yang meneliti tentang “Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan insfrastruktur di desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Kajhu dilihat dari proses pengelolaannya. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat. Persamaan dan perbedaan antara penulis dengan pneliti sebelumnya Kinaro yaitu:

a. Persamaannya yaitu sama-sama ingin meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
b. Perbedaan penulis dengan peneliti Maijon Kinaro yaitu penulis melakukan penelitian di Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya, sedangkan Peneliti Kinaro melakukan penelitian di desa Kujhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang di dasari pada penelitian berkondisikan obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) Sugiyono (2017, hal:9). Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji permasalah sosial yang kompleks yang dapat digunakan pemahaman yang luas dan mendalam terkait dengan realita dan fakta.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka hal ini dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif (Moleong, 2007 h.6). Dengan digunakannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini di harapkan bisa melihat dan mendapatkan informasi mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016, h:137) data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diberikan kepada peneliti atau pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Bahwasanya data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan secara langsung dengan cara mewawancari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai tujuan dari penelitian,

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yaitu sumber data yang diberikan tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen maupun lewat orang lain. Bahwasanya Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti catatan, laporan, dokumen penting, yang di dapatkan dari penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan oleh (Creswell, 2016) diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan berupa pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, penulis dapat mengajukan pertanyaan umum yang ingin diketahui terkait persoalan yang akan diteliti. Penulis melakukan kegiatan ini dengan cara mengamati langsung perilaku serta aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan baik secara langsung ataupun melalui perantara seperti telepon. Kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para partisipan. Wawancara terdiri dari beberapa cara yaitu:

1) Wawancara terstruktur

   Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data lebih mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

2) Wawancara tak berstruktur

   Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersususn secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen baik yang bersifat publik seperti artikel, laporan, dan koran maupun dokumen yang bersifat privat seperti buku harian, *e-mail*, dan surat.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Sugiyono, (2017,h:218). berpendapat bahwa untuk menentukan informan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik Purposive sampling ialah cara atau teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertetu.

Berdasarkan teknik tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik Gampong Kabu	1 Orang
2.	Bendahara Gampong Kabu	1 Orang
3.	Kaur Pembangunan Gampong Kabu	1 Orang
4.	Tuha Peut Gampong Kabu	2 Orang
5.	Masyarakat Gampong Kabu	7 Orang
	Total	12 Orang

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Guba 1985 dalam Anggito (2018, h.77) instrumen penelitian kualitatif yaitu di dalam penelitian tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai intrumen penelitian utama karena segala sesuatu nya belum mempunyai bentuk yang pasti.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah metode yang meneliti pada kondisi objek yang alami, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2007, h.4) di sini berarti bahwa peneliti sendirilah yang merupakan orang yang turun kelapangan dan melakukan wawancara dan pengamatan dengan informan dengan dibantu panduan wawancara, dokumen, dokumentasi dan lain-lain, yang bertujuan untuk memudahkan pelaksaan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa Data adalah merupakan menyusun dan mengurutkan data kedalam pola,kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumskan hipotetis kerja (Moleong, 2007, h.103). sedangkan menurut pendapat Miles (1992, h.15-19) langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

   Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan dilapangan kemudian di catat.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data yang telah didapat dan di tulis di lapangan.

Dan tujuannya adalah untuk mengarahkan dan menganalisis data sehingga bisa diperoleh kesimpulan.

c. Penyajian data adalah pengumpulan informasi yang telah disimpulkan dan pengambilan tindakan kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif berdasarkan aspek yang telah diteliti.

d. Verifikasi Data Atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah suatu kegiatan utuh yaitu data tersebut sudah diuji kebenarannya, dan kecocokannya.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017,h.270) uji kredibilitas data atau sebagai penguat agar data dapat dipercaya sebagai data asli dari hasi penelitiaan yang dilakukan dibagi beberapa macam yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan dalam penelitian jika ingin meningkatkan kepercayaan pada suatu data yang sudah diteliti maka diperlukan perpanjangan pengamatan artinya harus melakukan penelitian kembali kelapangan. Melakukan wawancara kembali untuk memperkuat data yang ada maupun untuk mendapatkan data yang baru. Dengan begitu antara peneliti dan informan semakin akrab dan adanya kepercayaan atara kedua pihak yang terkait dalam penelitian sehingga akan memperkecil adanya informasi yang tidak *Real*.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan terarah, maka pertanyaan yang diajukan saat wawancara kepada informan penelitian akan berkesinambungan agar hasil yang didapatkan memuaskan peneliti dan sebagai tambahan data jika masih kurang informasi yang tepat saat melakukan penelitian sebelumnya.

c. Triangulasi

Menurut William (1986) dalam Sugiyono (2017, h.273) Adanya Triangulasi Dalam Uji Kredibilitas Data Ini Memiliki Definisi Sebagai melihat data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan Bahan Referensi adalah ada bahan pendukung untuk meguatkan informasi yang didapat dari hasil yang diproleh pada saat melakukan penelitian.Pada saat melakukan wawancara atau obervasi perlu data pendukung seperti photo-photo, rekaman video dan dokumentasi lainnya untuk uji kredibilitas data.

e. Mengadakan Membercheek

Mengadakan membercheek adalah melihat data yang berikan oleh sipemberi data yang tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diperoleh selama penelitian sesuai dengan data yang berikan oleh sipemberi data. Apabila sama maka data yang diperoleh tersebut valid, apabila tidak sama maka perlu

dilakukan diskusi dengan sipemberi data ataupun memperbaharui temuan data yang didapatkan untuk kemudia disepakati dengan sipemberi data.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rancangan jadwal penelitian

No	**Kegiatan**	**Tahun 2020-2021**					
		11	12	1	2	3	4
Tahap 1							
1	Persiapan Penelitian						
2	Obseervasi Awal						
3	Pembuatan Proposal						
4	Konsultasi						
5	Perbaikan						
6	Seminar Proposal						
7	Perbaikan						
Tahap II							
8	Penelitian dilapangan						
9	Pengolahan Data						
10	Analisis Data						

Tahap III							
11	Penulisan hasil penelitian						
12	Konsultasi						
13	Seminar Hasil						
14	Perbaikan						
Tahap IV							
15	Sidang						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Gampong Kabu adalah salah satu gampong yang terletak di Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Kecamatan Tripa Makmur. Jarak gampong Kabu dengan ibu Kota Nagan Raya berjarak 55 Km. Luas wilayan Gampong Kabu 9X7 KM. Gampong Kabu dipimpin oleh seorang Gechik gampong, Geuchik gampong tersebut yang pemerintah dan mengendalikan gampong Kabu dan di bantu oleh beberapa aparatur Gampong yang terbagi dalam bidang kerja masing-masing. Saat ini gampong kabu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.137 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 361. Keadaan Iklim Gampong Kabu sebagaimana gampong-gampong lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis dan terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk lebih jelasnya data penduduk Gampong Kabu dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Kabu

Jumlah Kepala Keluarga	361 Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	562 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	575 Jiwa
Anak Masih Sekolah	143 Jiwa

Sumber: Keuchik Gampong Kabu

Gampong kabu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara berbatsan dengan Gampong Pasie Keubeudom Kecamatan Tripa Makmur.
2. Selatan berbatasan dengan Gampong Lueng Keubeu Jagat Kecamatan Tripa Makmur.

3. Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur.
4. Barat berbatasan dengan Gampong Krueng Hitam Kecamatan Darul Makmur.

Penduduk Gampong Kabu sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun, pekerjaan tersebut sangat di dukung dengan lokasi gampong kabu yang terletak di daratan yang memiliki lokasi perkebunan yang cukup luas dan terhindar dari banjir pabila musim penghujan tiba. Gampong Kabu merupakan daerah yang memiliki potensial untuk budidaya berbagai komoditi pertanian kerena di dukung dengan iklim yang bagus. Salah satu factor yang menentukan untuk budidaya komoditi pertanian adalah tingkat curah hujan yang cukup untuk memenuhi sebagai daerah perkebunan.

4.1.1. Potensi Ekonomi Gampong Kabu

Potensi ekonomi di gampong Kabu selama beberapa tahun terakhir ini perekonomian gampong kabu di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain kedua komoditi tersebut gampong kabu juga menghasilkan banyak tanaman perkebunan yang lain. Namun perkebunan kelapa sawit lebih diminati oleh masyarakat, melonjaknya harga kelapa sawit membuat banyak masyarakat yang membukan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga banyak lahan yang dijadikan perkebunan khusus kelapa sawit dan terus bertambah setiap tahunnya. Kelapa sawit lebih diminati oleh masyarakat karena bibit tanamannya mudah didapat, dan dapat tumbuh dengan mudah sehingga tidak perlu melakukan

banyak perawatan, dan pohonnya dapat tumbuh lama sehingga hasil panennya cukup lama dapat di nikmati oleh petani.

4.1.2. Fasilitas Bangunan yang ada di Gampong Kabu

Gampong Kabu memiliki beberapa fasilitas bangunan fisik yang didirikan oleh apatur Gampong Kabu untuk mempermudah masyarakat setempat. Bangunan-bangunan tersebut dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 4.2
Bangunan Fisik di Gampong Kabu

No	Jenis Bangunan	Unit	Sumber	Jumlah (Rp)
1.	TK (Taman Kanak-kanak)	1	Dana Desa 2019	25.002.000
2.	Lapangan Volly	1	Dana Desa 2018	20.550.000
3.	Lapangan Bola Kaki	1	Dana Desa 2019	219.750.000
4.	TPA Inti	1	Dana Desa 2018	74.892.000
5.	Jembatan	1	Dana Desa 2019	316.650.000
6.	Kantor Desa	1	Dana Desa 2018	175.016.560

Sumber: Wawancara dengan Kaur Pembangunan Gampong Kabu dan laporan APBG Gampong Kabu tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis bangunan fisik yang ada di Gampong Kabu terdapat satu unit TK atau taman kanak-kanak di gunakan untuk mendidik anak-anak sebelum menempuh pendidikan SD, satu unit lapangan bola kaki, satu unit TPA inti yang digunakan sebagai tempat pengajian bagi anak-anak Gampong Kabu, satu unit jemabatang yang digunakan untuk menghubungkan dengan Gampong sebelahnya dan satu unit kantor desa digunakan sebagai tempat kerja aparatur Gampong Kabu.

4.1.3. Visi Misi Gampong Kabu

Visi dari pemerintahan Gampong Kabu adalah, menciptakan Gampong Kabu menjadi Gampong yang maju, mandiri, sejahtera serta mewujudkan

lingkungan yang aman dan ketertiban masyarakat dan berakhlak mulia. Makna dari visi tersebut diuraikan di dalam misi pembangunan Gampong Kabu yaitu:

1. Meningkatkan fungsi perangkat gampong demi tercapai suksesnya roda pemerintahan Gampong dengan mengedepankan kejujuran transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat gampong.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah melalui berbagai program pendukung.
3. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan gampong Kabu.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dengan mewujudkan Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Gampong.
6. Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarkat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, perternakan, maupun industri rumah tangga.
7. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Gampong yang baik.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan Gampong.
9. Mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan oleh raga guna menumbuhkan kekompakan dalam masyarakat dan untuk menekan kenakalan remaja.
10. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peran ibu-ibu PKK.

4.1.4 Program Kerja Gampong Kabu

Untuk mengoptimalkan pembangunan Gampong maka disusun program kerja yang dilakukan di Gampong Kabu adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

   Pemerintahan Gampong merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, berbagai permasalahan dimulai dari Gampong. Maka dari itu pemerintahan Gampong harus solid, akuntabel, professional, ramah serta amanah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu:

   a. Pembenahan aparatur pemerintahan Gampong
   b. Peningkatan pelayanan publik
   c. Transparansi keuangan
   d. Sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Bidang pembangunan

   Dalam melakukan terhadap perubahan perlu adanya pembangunan dalam Gampong baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan sarana transportasi, pembangunan sarana kesehatan (posyandu) pembangunan sarana kemanan, pembanguna sarana pendidikan (TK dan TPA), pembangunan sarana oleh raga seperti penimbunan lapangan bola. Selain itu pemerintah Gampong Kabu juga melakukan penyuluhan kepada petani yang ada di Gampong Kabu, mengatur pengairan air terhadap sawah ketika musim kemarau, dan juga membina dan

mengoptimalkan kelompok tani secara optimal. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penduduk Gampong Kabu berprofesi sebagai petani. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pembangunan akhlak dengan membentuk tempat pengajian diskusi keagamaan.

3. Bidang sosial kemasyarakatan

   Bidang sosial kemasyarakatan meliputi:

   a. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya.
   b. Pembinaan kinerja keplor/kadus. Keplor merupakan pemimpin yang langsung berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat, oleh karena itu keberadaan keplor sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
   c. Pembinaan generasi muda, generasi muda merupakan generasi pemilik bangsa masa yang akan datang, maka dari itu sangat penting membina akhlak melalui pengajian-pengajian, diskusi keagamaan melalui wadah remaja masjid.
   d. Pembinaan PKK, pembinaan ibu-ibu di harapkan dapat berperan dalam meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak dini, meminimalisir kenakalan remaja, pergaulan bebas serta kekerasan terhadap anak.
   e. Lembaga lain, lembaga lain harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan Gampong Kabu. Salah satu lembaga lain yang ada di

Gampong Kabu adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang berupa pengelolaan hasil pertanian.

4.2 Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini informan penelitian terdiri dari, Gechik Gampong, Bendahara Gampong, Kaur Pembangunan, Tuha Peut dan perwakilan masyarakat Gampong Kabu.

Tabel 4.3
Karakteristik Informan

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Gampong Kabu	1 Orang
2	Bendahara Gampong Kabu	1 Orang
3	Kaur Pembangunan Gampong Kabu	1 Orang
4	Tuha Peut Gampong Kabu	2 Orang
5	Masyarakat Gampong Kabu	7 Orang
Total		12

Sumber: Penelitian 2020

4.3 Hasil Wawancara

4.3.1 Hasil Wawancara dengan Aparat Gampong Kabu

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2015 dengan dasar PP No.72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Gampong. Alokasi dana ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Kabu agar dapat

tumbuh dan perkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Kabu mengenai berapa anggaran yang diberikan untuk anggaran desa terhadap pembangunan Gampong Kabu pada tahun 2019. Pada hasil wawancara tersebut memberikan jawaban

> "Jumlah dana desa yang diterima Gampong Kabu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.218.000.000 dan dana yang disalurkan khusus untuk pembangunan sebesar Rp 519.159.200 dari jumlah dana desa Rp. 1.218.000.000, disebabkan pembangunan desa lebih diutamakan untuk menjadikan Gampong Kabu lebih mandiri dan maju melalui perbaikan insfrastruktur dan untuk kepentingan masyarakat sekitar". Bendahara Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Kemudian dari wawancara dengan Geuchik Gampong Kabu apa tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan anggaran desa terhadap pembangunan Gampong, dari wawancara tersebut menerangkan bahwa;

> "tujuan yang ingin dicapai pada penggunaan dana desa yang paling utama adalah dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Gampong lebih maju dan mandiri. Alhamdulillah dana desa sangat membantu perekonomian masyarakat saat ini mulai dari alokasi dana untuk pembangunan gampong juga memberikan dana untuk modal usaha bagi masyarakat, semoga dengan dana desa yang ada saat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat". Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Wawancara dengan geuchik gampong kabu tentang bagaimana penyusunan program pembangunan yang dilakukan pemerintahan gampong. Menerangkan bahwa;

> "Penyusunan program pembangunan gampong dilakukan oleh aparat Gampong sesuai dengan hasil keputusan musrembang, yang dihadiri oleh seluruh aparatur Gampong Kabu, apa yang dibutuhkan untuk memajukan gampong, kemudian bersama-sama memutuskan apa yang sebaiknya di dahulukan sesuai dengan dana yang di anggarkan". Hasil wawancara dengan geuchik gampong kabu. "(16 Agustus 2021)"

Wawancara dengan kaur keuangan gampong Kabu mengenai bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian dalam mengelola anggaran dana desa untuk pembangunan, dari hasil wawancara tersebut menerangkah bahwa;

> "Sistem pengawasan yang dilakukan aparat gampong terhadap dana desa dilakukan secara transparan, pelaporan hasil kerja di umumkan pada papan pengumuman yang ada digampong, hal ini untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, semua hasil kerja dan belanja keperluan dana pembangunan akan dilaporkan setiap minggu di papan pengumuman, transparasi dan keterbukaan apparat gampong terhadap dana-dana desa dapat menekan kesalah pahaman dan ketidak sesuaian terhadap dana desa". Hasil wawancara dengan geuchik gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Jawaban tersebut sama halnya yang diutarakan oleh bendahara Gampong Kabu bahwa;

> "jumlah dari dana desa yang dicairkan lebih banyak disalurkan untuk pembangunan karena dengan meningkatkan pembangunan desa maka dapat meningkatkan perokonomian desa dan menjadikan desa lebih mandiri". Hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Dalam melaksanakan pembangunan Gampong diperlukan strategi-strategi untuk pelaksanaan pembangunan, hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Gampong Kabu bahwa;

> "strategi pembangunan sangat diperlukan dimulai dari perencanaan program-program pembangunan, agar pembangunan yang

> direncanakan tidak terbengkalai dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan strategi perencanaan pembangunan yang matang agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat". Hasil wawancara dengan kaur pembangunan. "(16 Agustus 2021)"

Hasil wawancara mengenai penyeusunan program pembangunan yang dilakukan Gmpong Kabu, wawancara dengan Geuchik Gampong berpendapat bahwa;

> "proses pembangunan di Gampong Kabu diawali dengan melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaannya, dalam proses pengerjaannya dilakukan pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian di tahap akhir dilakukan pelaporan tugas akhir". Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Hasil wawancara terhadap Geuchik Gampong Kabu yang berkaitan dengan bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana desa di Gampong Kabu, dari pertanyaan tersebut beliau berpendapat bahwa;

> "dana desa yang diberikan pemerintah untuk gampong digunakan untuk kepentingan gampong, seperti penimbunan jalan dan membuka jalan baru ini sangat berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas jika insfrastruktur jalan baik dan diharapkan dengan dana desa dapat memajukan Gampong". Geuchik Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kabu tentang pelaksanaan pembangunan Gampong Kabu yang mengatakan bahwa;

> "Pelaksanaan pembangunan di Gampong Kabu semuanya dilaksanakan oleh masyarakat, namun hal ini tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun. Misalnya seorang petani tidak akan dilibatkan dalam pengelolaan pembangunan karena tidak segi pemahaman terhadap struktur pembangunan, tetapi aspirasi semua

> masyarakat tetap akan di tamping demi menjaga keharmonisan sesame masyarakat". Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Selanjutnya hasil wawancara dengan tuha peut gampong Kabu apakah pelaksanaan pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif dan efesien. Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Kabu mengatakan bahwa;

> "Pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong sudah berjalan secara efektif dan efesien karena sudah sesuai dengan hasil usulan musyawarah sebelumnya, sebelum memutuskan untuk melakukan pembangunan aparatur gampong melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat agar pembangunan gampong dilakukan secara transparan". Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Hasil wawancara dengan bendahara Gampong yang berkaitan terhadap pemabangunan gampong sudah efektif dan efesien, beliau mengatakan bahwa;

> "Pembangunan di Gampong Kabu sudah sudah sangat baik, jadi kalau ditanya masalah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, ya sudah sangat sesuai karena pembangunan dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan bersama antara masyarakat dengan aparatur Gampong, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan hasil musyaawarah dan kesepakatan bersama supaya hasil yang didapatkan sesuai dengan yang direncanakan". Hasil wawancara dengan bendahara Gampong Kabu. "(16 Agustus 2021)"

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sudah efektif karena sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bupati dan Qanun daerah, dan melalui musrembang desa. Dari hasil musrembang yang dilakukan pembangunan disepakati untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk

disepakati bersama, kemudian baru memutuskan. Pembangunan gampong juga dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal yang memiliki pengetahuan pada bidangnya.

4.3.2 Hasil Wawancara denga Masyarakat Gampong Kabu

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapat Darmisal salah satu masyarakat Gampong Kabu mengenai apakah program pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, beliaun mengatakan bahwa

> "Pembangunan yang dilakukan di Gampong Kabu sudah sangat sesuai dengan keinginan masyarakat, karena pembangunan yang di lakukan melalui musyawarah bersama dan disepakati bersama, seperti pembangunan masjid itu sangat di butuhkan masyarakat, dengan adanya pembangunan masjid di gampong masyarakat jadi lebih bersemangat dalam beribadah, tidak khawatir terjadi kebocoran apabila musim hujan tiba, dan bangunan masjid jadi lebih bagus dari sebelumnya", (hasil wawancara dengan Bapak Darmisal masyarakat Gampong Kabu).

Selanjutnya mengenai apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program yang dilaksanakan pemerintahan Gampong Kabu, beliau mengatakan bahwa;

> "Banyak manfaat yang didapat, diantaranya masjid terlihat lebih bagus dan luas, bisa menampung banyak jamaah, dari pembangunan tribun bola kaki manfaat yang di dapat untuk menjadi pemuda-pemuda pada Gampong Kabu lebih kreatif dan mengembangkan kemampuan mereka dalam dunia olah raga, lapangan bola kaki juga lebih bagus tidak becek lagi, pemuda dan anak-anak jadi bersemngat dalam menyalurkan bakat-bakat mereka dalam olah raga sepak bola", (hasil wawancara dengan Bapak Darmisal masyarakat Gampong Kabu)

Selanjutnya hasil wawancara yang berkaitan dengan apakah program pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan efektif dan efesien, masyarakat menjawab bahwa;

> "Pembangunan yang dilakukan di Gampong Kabu sudah sesuai karena pembangunan dilakukan dengan kesepatan bersama, dalam pembangunan yang dilakukan, pilih bangunan yang menjadi kebutuhan yang paling dibutuhkan dan dapat memberikan bagi masyarakat, keputusan pembangunan gampong juga di ambil dari keputusan hasil musyawarah gampong", (hasil wawancara Bapak Rahman masyarakat Gampong Kabu).

Hasil wawancara mengenai apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintahan gampong, dari hasil wawancara tersebut menerang bahwa;

> "Sangat banyak manfaan yang kami rasakan dari pembangunan gampong di antaranya pembangunan box calver, pembangunan ini dapat mengaliri air kesawah sehingga kami tidak perlu khawatir sawah kami kekurangan air pada musim kemarau, pembangunan box calver ini juga dapat mengurangi genangan-genangan air bahkan dapat mengantisipasi banjir di jalan sehinggan jalanan tetap bisa dilalui walaupun musim hujan tiba, pembangunan gampong sangat banyak membantu masyarakat", (hasil wawancara dengan Bapak Rusli masyarakat Gampong Kabu).

Selanjutnya wawancara yang berkaitan dengan apakah program pelaksanaan pembangunan gampong Kabu sudah berjalan efektif dan efesien, pada hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa;

> "Pembangunan di Gampong Kabu sudah sangat efektif menurut saya karena semua pembangunannya sudah sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat, apparat gampong tidak mengambil keputusan sepihak tetapi lebih menampung keinginan yang lebih banyak menguntungkan bagi masyarakat, menurut saya ini sangat bagus dan sudah efektif karena keputusan berdasarkan hasil mufakat

> dengan masyarakat, jadi hasilnya jadi lebih efektif", (hasil wawancara dengan Bapak Rusli masyarakat Gampong Kabu).

Pada wawancara yang berkaitan dengan apakah pembangunan gampong sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, dari wawancara ini menerangkan bahwa;

> "Program yang dibangun di gampong Kabu sudah sesuai karena di bangun dengan kesepakatan bersama,pemabangunannyapun di bangun oleh rakyak dan untuk rakyak, apparat gampong menggunakan tenaga kerja local untuk membangun gampong hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran di Gampong Kabu", (wawancara dengan Bapak Rahman, masyarakat Gampong Kabu).

Wawancara Sama dengan jawaban bapak Rahman masyarakat Gampong Kabu bahwa;

> "pembangunan di Gampong Kabu sudah sesuai dilakukan dengan hasil musyawarah dan dilaksanakan dengan hasil dari kerja dan kreatifitas masyarakat gampong Kabu, dengan pembangunan yang ada di gampong Kabu saat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat". (hasil wawancara dengan Ibu Laili masyarakat Gampong Kabu).

Pada pertanyaan selanjutnya tentang, Apakah setiap pelaksanaan program pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif dan efesien, pembangunan di gampong kabu belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pembangunan yang belum tepat, seperti belum berpihak kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, seperti pembangunan air bersih bagi masyarakat kurang mampu, sampai saat ini belum tercapai, (wawancara dengan ibu Laili masyarakat Gampong Kabu)

Selanjutnya apakah manfaat yang diperoleh masyarakat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong, dari hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa;

> "Manfaat yang didapat dari pembangunan gampong yaitu secara langsung mengurangi jumlah pengangguran di gampong kabu, pembangunan di gampong kabu menjadi lebih lancar, aliran air ke sawah jadi lancar, mengurangi genangan-genangan air di jalan pada musim hujan, juga anak-anak muda dan remaja menjadi lebih kreatif, tersedianya tepat olah raga yang layak sehingga bisa menekan kenakalan remaja, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat", (hasil wawancara dengan Ibu Laili masyarakat Gampong Kabu).

Selanjutnya wawancara tentang bagaimanakah sistem pengawasan dan pengendalian yang pemerintahan Gampong lakukan dalam mengelola anggaran desa untuk pembangunan Gampong Kabu, sistem pengawasan yang dilakukan aparat gampong masih lamban, banyak pekerjaan yang lalai dari pengawasan sehingga banyak pembangunan yang baru di bangun menjadi cepat rusak, hal ini kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga para pelaku usaha bekerja tanpa pengawasan dan hasilnya kurang maksimal, sistem pengawasan dan pengendalian di gampong kabu masih kurang optimal karena masih banyak pembangunan yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (Wawancara dengan Bapak Rahmat, masyarakat Gampong Kabu).

Selanjutnya pertanyaan tentang, apakah setiap pelaksanaan program pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif dan efesien, sebagai sudah efektif, sebagian belum, karena sampai saat ini saya belum marasakan hasilnya, jalan didepan rumah saya masih berlubang belum ada tindakan perbaikan dari pihak apparat gampong, apparat gampong lebih

mengutamakan pembangunan jalan baru dari pada memperbaiki jalan yang rusak, menurut saya itu belum sepenuhnya efektif, pada segi pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya lebih mengutamakan masyarakat kecil yang benar-benar memerlukan bantuan seperti bantuan pembuatan air bor, karna di gampong kabu tidak semua masyarakat mampu memiliki sumur bor untuk mendapatkan air bersih, (wawancara dengan Bapak Rahmat, masyarakat Gampong Kabu).

Dari hasil penelitian dengan masyarakat gampong Kabu dapat disimpulakan bahwa pembangunan di gampong kabu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah berjalan secara efektif dan efesien. Hal ini diutarakan langsung oleh masyarakat pada saat penelitian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan gampong yang dilakukan oleh aparatur gampong, pada tahun 2019 alokasi dana gampong digunakan untuk tribun lapangan bola kaki, pembangunan ini memberikan manfaat bagi anak-anak usia remaja untuk menyalurkan bakat mereka dalam olah raga, kemudian dilakukan pembangunan masjid, pembangunan masjid memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih focus dalam beribadah, masjid dapat menampung banyak jamaah, dan tempat ibadah jadi lebih nyaman. Selanjutnya pembangunan box calver memberikan manfaat bagi petani untuk mengaliri air ke sawah-sawah dan dapat mengurangi gelinangan air di musim hujan, pembangunan jalan baru memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat memudahkan petani untuk mengangkut hasil panennya dengan mudah kendaraan dapat masuk dan keluar tanpa kendala. Sampai saat ini pembangunan yang di bangun dari dana Gampong Kabu dapat direalisasikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, hal ini sudah sesuai

dengan ketentuan dan peraturan dana desa yang diatur dalam peraturan-paraturan dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Kabu

Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada Gampong Kabu sangat berdampak kepada pertumbuhan pembangunan Gampong Kabu terutama pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa akan sangat membantu utuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dikarenakan dana desa membantu keuangan desa untuk membangun swakelola baik fisik maupun non fisik. Dengan adanya sistem swakelola dari alokasi dana desa ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi pendapatan dan juga pemberian lapangan pekerjaan untuk masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan.

Dari hasil penelitian diketahui pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif diman dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan melibatkan anggota masyarakat. Pembangunan dari hasil dana desa di alokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong, hal ini dapat menunjang perekonomian gampong semakin baik. Pada tahapan pembangunan dilaksanakan dengan sangat matang sehinggan pekerjaan yang dilakukan tidak terbengkalai dapat diselesaikan sesuai target seperti yang disepakati dan direncanakan.

Transparansi informasi dari pemerintah desa mulai dari informasi musyawarah yang diumumkan kepada seluruh masyarakat sampai informasi

anggaran yang diterima desa sehingga kesalahpahaman bisa di antisipasi oleh aparat Gampong. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Boedijono, dkk (2019) dimana proses pembangunan dilakukan dengan di awasi oleh apparat gampong secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi-aspirasi untuk kepentingan bersama.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Gampong Kabu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparatur gampong dalam membangun gampong harus di dasari dengan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat, berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di putuskan kagiatan yang dilakukan secara swakelola yaitu dengan malibatkan masyarakat lokal dalam pekerjaannya, kemampuan aparatur gampong dalam mengelola dana desa sangat mempengaruhi dalam segi pembangunan desa yang efektif.

Pelaksanaan dilakukan secara trasparan kepada anggota masyarakat, sebelum melakukan pembangunan aparat gampong mengadakan rapat rutin dalam rangka menyusun program pembangunan serta menampung aspirasi-aspirasi masyarakat untuk bersama-sama menciptakan gampong yang hebat dan mendiri. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sudah efektif.. Sejak tahun 2019 dana desa sudah berjalan sangat baik di Gampong Kabu, aparatur Gampong memanfaatkan dana desa tetap bergulir dan berkembang seperti membeli perkebunan sawit yang saat ini telah berjalan dan menghasilkan, tidak hanya membangun fisik desa aparatur gampong mamanfaatkan dana desa untuk non fisik, saat ini hasil dari kebun sawit pada Gampong Kabu mencapai 14

juta pertahun, dana tersebut dialokasikan pada kas desa untuk memperluas perkebunan sawit di Gampong Kabu yang saat ini sudah memiliki luas 3h.

5.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Gampong Kabu

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan mekanisme penyaluran dana desa di Gampong Kabu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 49 tahun 2016, dimana penyaluran dana desa dipindahkan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Setelah Gampong Kabu menyusun segala macam persyaratan yang ditentukan, Gampong akan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, barulah dana dar RKUD tersebut dapat di transfer ke rekening Gampong Kabu.

Gampong kabu juga melaksanakan pertanggung jawaban terhadap dana yang digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. Seperti adanya laporan-laporan pertanggung jawaban terkait hasil kerja yang dipublikasikan terhadap masyarakat. Melaksanakan partisipatif, dimana dalam pengelolaan dana desa masyarakat di tuntut untuk berpartisipasi dan ikut dalam rapat maupun pelaksanaan kegiatan, bahkan memancing masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya saat musyawarah berlangsung. Berikut gambar pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sebagai berikut:

Gambar IV.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Desa
Gampong Kabu

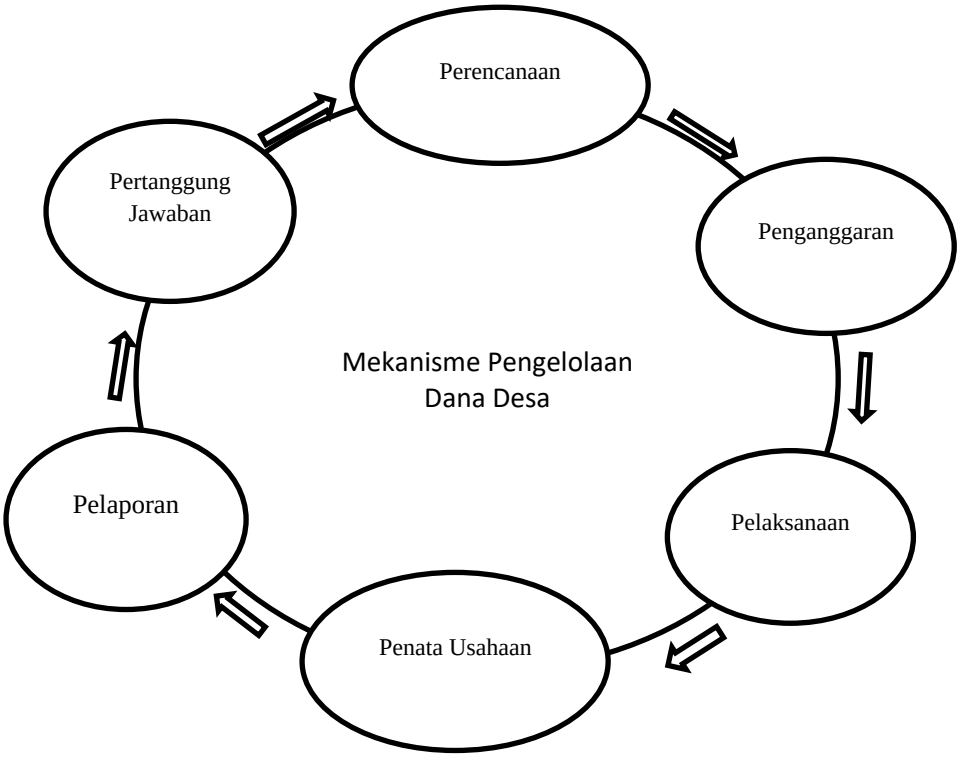

Sumber: Bendahara Gampong Kabu, 2020

5.2.1 Perencanaan

Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang di sepakati tersebut. Perencanaan juga dapat di artikan dalam berbagai perspektif di antaranya, perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Maka dari hasil penelitian yang penulis lakukan perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sudah maksimal dengan hasil-hasil yang sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

5.2.2 Penganggaran

Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satu moneter. Dalam pengelolaan dana desa setelah melakukan perencanaan-perencanaan yang matang maka akan dilakukan penganggaran yang mengacu pada proses dimana untuk memperkirakan keuangan untuk periode mendatang dan merencanakan operasinya. Dalam mengembangkan anggaran terhadap dana desa perlu dilakukan rencana proyek kemudian menentukan jumlah waktu, tujuan dan biaya yang akan dikeluarkan.

5.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pengelolaan dana desa di Gampong Kabu setelah melalui perencanaan dan penganggaran kemudian dilakukan pelaksanaan untuk dilakukannya kegiatan yang telah di anggarkan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam upaya mencapai keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan kerja yang dapat berlangsung secara efektif dan efesien.

5.2.4 Penata Usahaan

Penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setelah kegiatan dilakukan maka perlu dilakukan pelaporan untuk

mempertanggung jawabkan dana desa, pelaporan hasil kerja serta pelaporan material-material dana proyek untuk menfasilitasi kagiatan yang dilakukan.

5.2.5 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan. Informasi yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahapan pelaporan keuangan dimulai dari identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke pengungkapan informasi keuangan dan informasi dana proyek yang dikeluarkan. Pelaporan yang dilakukan di Gampong Kabu cukup jelas, tersusun dan mudah di pahami sehingga dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

5.2.6 Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua pembangunan yang dilakukan dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kegiatan yang mungkin ditimbulkan. Pertanggung jawaban adalah langkah akhir yang dilakukan untuk menuntaskan pembangunan atau pertanggung jawaban atas penggunaan dana-dana yang diguanakan. Pertanggung jawaban dilakukan haruslah rasional sesuai dengan hasil akhir yang di hasilkan. Pada alokasi dana desa di Gampong Kabu pertanggung jawaban yang dilakukan cukup transparan dan dengan melakukan pengumuman hasil akhir pada seluruh aparatur Gampong, sehingga dana desa dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal.

5.3 Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Dana Desa

Alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan dan dana dapat digunakan sebagaimana yang telah di tentukan maka terdapat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan dana desa agar tersalur dengan baik dan dapat di manfaatkan oleh rakyat, paraturan-paraturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/2019 pasal 24 yang mengatur syarat pencairan dana desa pada tahap 1, para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota terkait tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Pada tahap II, pemimpin wilayah wajib membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Tahap III, mereka harus membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%.

Selanjutnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2018. Bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara/anggaran Kabupaten kepada desa/Gampong perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018. Selanjutnya pasal 12 ayat 1, peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara beserta perubahannya. Bupati atau wali kota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa, bahwa berdasarkan

pertimbangan tentang pembagian dan penetapan besaran, pengelolaan dan penggunaan dana desa bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Peraturan Gampong terhadap alokasi Dana Desa tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa;
2. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong;
3. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya desa.

Dana desa yang di peruntukan untuk kesejahteraan gampong Kabu telah di manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, pada tahun 2018 total dana desa Gampong Kabu sebesar Rp. 774.400.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.218.000.000,00, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan dana desa tersebut didasari dari pemanfaatan dana desa yang efektif, pertanggung jawaban yang transparan sehingga dana desa pada gampong kabu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk desa, sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan, dana desa diperuntukan untuk desa dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Dana desa di Gampong Kabu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.218.000.000,- dari anggaran dana desa tersebut di alokasi kan untuk dana pembangunan Gampong sebesar Rp. 519. 159.200,- yang digunakan untuk pembangunan serak sertu jalan, pembangunan tribun lapangan bola kaki, pembangunan masjid dan pembangunan box calver.
3. Efektifitas pengelolaan dana desa di Gampong Kabu Kecamatan Nagan Raya sudah efektif karena sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atauran yang berlaku yaitu sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 1-3.
4. Mekanisme pengelolaan dana desa di Gampong Kabu sudah sesuai karena sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

6.2 Saran

Dari uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Gampong agar pembangunan yang dilakukan di Gampong dapat lebih maksimal sehinggan alokasi dana pada tahun selanjutnya dapat di manfaatkan dengan tepat.
2. Pelaporan penyerapan dana pembangunan Gampong sebaiknya dilakukan secara lisan dan tulisan agar lebih transparan dan akuntabel sehinggan masyarakat dapat mengetahui rincian dana yang terpakai.
3. Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan wawasan dan pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana desa agar dapat tepat guna dan mencapai apa yang telah di amanahkan Undang-Undang dengan anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Indrawati. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Juned, T. M. (2009). *Menuju Revitalitasasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP. Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik.* Alfabeta. Bandung

Saul M. Katz dalam Yuwono. (2001). *Pembangunan Sebagai Perubahan Soaial Yang Besar Dari Suatu Keadaan*. Fisip unmul.

Sondang P. Siagan (2008). *Managemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara Jakarta

Sugiyono, (2016) . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT, Alfabeta

Sari, (2014). Efektiftas Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap Pembangunan Gampong Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, *Universitas Teuku Umar, Meulaboh.*

Fitri, (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyerejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.*

Novita, (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, *universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, jakarta.*

Kinaro, (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, *Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh.*

Boedijono, Wicaksono, G, & Puspita, Y et al. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso: *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 4 (1), 9 – 20.*

Moeljono, Kusumo. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak): *Jurnal majalah ilmiah solusi, 17 (3).*

Mutrisna, Z. F, Adam, I, & Sugandhi. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019: *Jurnal Pemerintahan Integratif, 8 (1), 614-623.*

Umuluddin (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016,* Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Angeng Tirtayasa, 44-47

Kebijakan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang anggaran 2019

Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Perintah Gampong

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolalaan keuangan gampong tahun 2020

Peraturan Kepala desa Kabu Nomor 8 Tahun 2020 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Kabu tahun anggaran 2020

PEDOMAN WAWANCARA

Pemerintahan Gampong

1. Berapa Jumlah anggaran yang diberikan untuk penggunaan anggaran desa terhadap pembangunan Gampong?
   Jawab:
2. Apa tujuan yang hendak di capai dalam penggunaan anggaran desa tahun 2019 terhadap pembangunan gampong?
   Jawab:
3. Strategi apa yang dilakukan pemerintahan gampong dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Kabu:
   Jawab:
4. Bagaimanakah proses penyususnan program pembangunan yang pemerintah Gampong lakukan?
   Jawab :
5. Apakah setiap pelaksanaan program pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif dan efesien?
   Jawab:
6. Bagaimanakah sistem pengawasan dan pengendalian yang pemerintahan Gampong lakukan dalam mengelola anggaran desa untuk pembangunan Gampong Kabu?
   Jawab:

Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang dibangun oleh pemerintahan Gampong sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
   Jawab:
2. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong?
   Jawab:
3. Apakah setiap pelaksanaan program pembangunan di Gampong Kabu sudah berjalan secara efektif dan efesien:
   Jawab:

Wawancara dengan Keuchik Gampong Kabu

Wawancara dengan Bendahara Gampong Kabu

Wawancara dengan Kaur Pembangunan Gampong Kabu

Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kabu

BIODATA

A. Biodata Diri

Nama	: Liana Wulandari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Kabu, 06 Februari 1998
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Anak Ke	: 2 dari 3 bersaudara
Email	: lianawulandari45@gmail.com
Alamat Rumah	: Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya

B. Biodata Orang Tua / Wali :

Nama Ayah	: (Alm). Mustafa
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Nurijah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah	: Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya

C. Pendidikan Formal

(2002-2009)	: SD Negeri Lueng Keubeu Jagat
(2009-2012)	: SMP Negeri 3 Darul Makmur
(2012-2015)	: SMA Negeri Bunga Bangsa
(2017-2022)	: Prodi ADM (Administrasi Negara) Fakultas FISIP (Ilmu Sosial dan Politik) Universitas Teuku Umar